

## STRATEGI PEMERINTAH KOTA JAMBI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Zamzami<sup>1)</sup>, Erni Achmad<sup>2)</sup>, Uvis Ramadhansyah<sup>3)\*</sup>, Hariatia<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Prodi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

<sup>4)</sup>Universitas Satyagama Jakarta

\*E-mail korespondensi: [uvispascamieunja@gmail.com](mailto:uvispascamieunja@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis; (1) perkembangan PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, jumlah wisatawan, serta penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, (2) pengaruh PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi periode 2001-2021, dan (3) strategi pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah BPPRD dan BPS Kota Jambi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil pendataan PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, jumlah wisatawan, serta penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama kurun waktu 2001-2021 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi selama periode 2017-2021 meliputi; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan. Berdasarkan hasil analisis faktor strategis internal dan hasil analisis faktor strategis eksternal didapatkan bahwa model strategi yang paling tepat untuk diterapkan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu strategi Kekuatan-Peluang (SO), yang mencakup; (1) mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hotel dan restoran, (2) melakukan pendataan wajib pajak hotel dan restoran secara efektif, (3) bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam rangka memajukan kepariwisataan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kota jambi, (4) mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan tentang pajak hotel dan restoran kepada seluruh wajib pajak, (5) memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan sumber daya manusia yang memadai dan potensi wisata daerah, (6) pemanfaatan jaringan sistem informasi pelayanan pajak secara maksimal, dan (7) meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik. Berdasarkan hasil temuan ini disarankan pemerintah daerah agar memanfaatkan insentif finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan bisnis hotel dan restoran serta membantu mereka meningkatkan layanan yang mereka berikan agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran yang ada di Kota Jambi.

**Kata kunci:** strategi, pajak hotel, pajak restoran

### Abstract

The purpose of this research is to analyze: (1) the development of Gross Regional Domestic Product (GRDP), inflation rate, the number of taxpayers, the number of tourists, and the revenue from hotel and restaurant taxes, (2) the influence of GRDP, inflation rate, the number of taxpayers, and the number of tourists on the revenue from hotel and

*restaurant taxes in Jambi City during the period 2001-2021, and (3) the strategies of the Jambi City government in increasing revenue from hotel and restaurant taxes. This research uses a quantitative descriptive method, where the data sources for this study are the Regional Revenue Agency (BPPRD) and the Central Bureau of Statistics (BPS) of Jambi City. The data obtained are then analyzed using quantitative analysis techniques and descriptive analysis. Based on the data collected on GRDP, inflation rate, the number of taxpayers, the number of tourists, and the revenue from hotel and restaurant taxes during the period 2001- 2021, it shows fluctuating developments. The results of hypothesis testing prove that the factors influencing the revenue from hotel and restaurant taxes in Jambi City during the period 2017-2021 include; Gross Regional Domestic Product (GRDP), the number of taxpayers, and the number of tourists. Based on the analysis of internal strategic factors and external strategic factors, the most appropriate strategy model to be applied in increasing revenue from hotel and restaurant taxes is the Strengths-Opportunities (SO) strategy, which includes; (1) optimizing the intensification and extension programs for collecting hotel and restaurant taxes, (2) conducting effective registration of taxpayers in hotels and restaurants, (3) collaborating with all stakeholders to advance tourism and increase the number of domestic and international tourists visiting Jambi City, (4) intensifying the implementation of tax education for all taxpayers, (5) utilizing regional autonomy policies to the fullest extent possible by using adequate human resources and the region's tourism potential, (6) maximizing the use of tax service information network systems, and (7) enhancing cooperation with businesses and the community by providing more attractive facilities in hotels and restaurants. Based on these findings, it is recommended that the local government utilize the financial incentives provided by the central government to facilitate hotel and restaurant businesses and help them improve the services they provide to increase the number of tourists visiting hotels and restaurants in Jambi City.*

**Keyword:** *strategy, hotel tax, restaurant tax*

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah (Anggoro, 2017). Berdasarkan catatan statistik jasa akomodasi Kota Jambi tahun 2019 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki jumlah hotel terbanyak di Provinsi Jambi, yaitu 99 hotel, yang terdiri dari 29 hotel berbintang dan 70 hotel non bintang. Sementara untuk jumlah restoran di Kota Jambi hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 127 restoran, dimana 29 diantaranya terdapat di hotel berbintang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke kota jambi tentunya menjadikan kebutuhan jumlah kamar di Kota Jambi semakin bertambah terutama hotel-hotel bisnis yang menyediakan fasilitas bisnis, yang juga akan meningkatkan kebutuhan layanan restoran di hotel tersebut, termasuk juga kebutuhan para wisatawan kuliner yang ingin mencoba berbagai kuliner khas kota jambi yang disajikan oleh berbagai restoran di Kota Jambi. Hal tersebut menjadikan sektor perhotelan dan restoran di Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang positif untuk dikembangkan dan dapat menjadi salah satu sektor bisnis yang menguntungkan.

Hasil pendataan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tahun 2020 (Tabel 1.), diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi selalu mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2019, namun adanya pandemi covid 19 menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak

restoran. Dari data ini diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp. 11.334.470.360 per tahun, sementara rata-rata penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp. 36.474.939.701 per tahun. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajakhotel di Kota Jambi.

Rata-rata perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel yaitu 2,23 persen per-tahun. Sedangkan rata-rata perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran yaitu 36,07 persen per-tahun. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran jauh lebih tinggi dibandingkan perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel. Adapun perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 27,17 persen. Sementara realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 68,7 persen.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak hotel dan restoran salah satunya dipengaruhi oleh strategi yang digunakan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPRD Kota Jambi, diantaranya yaitu melakukan intensifikasi penagihan atau penagihan aktif pajak yaitu dengan pendekatan persuasif kepada wajib pajak, serta melakukan optimalisasi pendataan dan ketetapan pembayaran wajib pajak hotel dan restoran di Kota Jambi. Namun, masih ditemukan permasalahan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, yaitu masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pengusaha hotel dan restoran yang melanggar kewajibannya dalam membayar pajak hotel dan restoran, serta rendahnya pengawasan yang dilakukan sehingga apa yang menjadi hak dan permasalahan yang dihadapi wajib pajak hotel dan restoran tidak diketahui oleh petugas pemungut pajak.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak hotel dan restoran tidak hanya dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan BPPRD Kota Jambi, selaku pemungut pajak hotel dan pajak restoran, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, jumlah hotel dan jumlah restoran (jumlah wajib pajak), serta jumlah wisatawan (Suardi dkk, 2016; Ali dkk, 2018; Putra, 2016; Afrizal dkk, 2019, Aliandi dan Handayani, 2013; Solot, 2018, Widyaningsih dan Budhi, 2014; Purnamawat, 2022). Terkait dengan pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, pada dasarnya PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin besar PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat, khususnya di sektor industri makanan dan perhotelan. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat di sektor industri makanan dan perhotelan, tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Hasil penelitian Aji dkk (2018), Putra (2016), dan Afrizal dkk (2019) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Terkait dengan pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat karena adanya kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi ini tentunya dapat mengakibatkan minimnya minat seseorang untuk menginap dihotel dan mengunjungi restoran. Penurunan daya beli dan minat masyarakat ini tentunya akan berdampak pada menurunnya pendapatan hotel dan restoran, yang berujung pada menurunnya kemampuan wajib pajak (pemilik hotel dan restoran) untuk membayar pajak hotel dan pajak restoran. Adapun perkembangan inflasi di Kota Jambi. Hasil penelitian Dewi dkk (2018) serta Agustina dkk (2016) membuktikan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak.

Jumlah wisatawan merupakan faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke Kota Jambi, maka tentunya akan semakin meningkat kebutuhan jasa akomodasi perhotelan serta kebutuhan akan konsumsi makanan (kuliner). Kondisi ini tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi. Hasil penelitian Putra (2016), Aliandi dan Handayani (2013), dan Purnamawati (2022) membuktikan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Begitupula dengan jumlah hotel dan jumlah restoran (jumlah wajib pajak), dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah hotel dan jumlah restoran di Kota Jambi, maka semakin besar pula penerimaan pajak hotel dan restoran. Hasil penelitian Putra (2016), Solot (2018), dan Purnamawati (2022) membuktikan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

## **2. METODE**

### **Metode penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, jumlah wisatawan, serta penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, serta strategi Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi periode 2001-2021.

### **Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Data primer tersebut didapatkan melalui kuesioner SWOT yang dibagikan kepada 40 orang pegawai di BPPRD Kota Jambi. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat *time series* dalam kurun waktu 2001-2021, meliputi; (1) realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi, (2) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), (3) tingkat inflasi, (4) jumlah wajib pajak hotel dan restoran, dan (5) jumlah wisatawan. Data sekunder ini didapatkan melalui dokumentasi dari laporan yang dipublikasikan oleh BPS Kota Jambi dan BPPRD Kota Jambi.

### **Analisis data**

Untuk menganalisis perkembangan PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, jumlah wisatawan, serta penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama periode periode 2001-2021, digunakan teknik statistic deskriptif. Sementara untuk menganalisis pengaruh PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi periode 2001-2021, digunakan teknik analisa kuantitatif dengan menggunakan alat analisis berupa regresi linier berganda. Terkait dengan strategi Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, digunakan teknik analisis SWOT.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan PDRB, Tingkat Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Wisatawan, serta Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

#### **1) Analisis Perkembangan PDRB Kota Jambi Periode 2001-2021**

Perkembangan PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2001-2021, menunjukkan adanya fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan PDRB per-tahun sebesar 17,77 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 19.561 miliar rupiah, sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 2.075 miliar rupiah. Jika dilihat dari perkembangan PDRB, diketahui bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 254,98 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar-3,28 persen.

Merujuk pada tingginya nilai perkembangan PDRB Kota Jambi pada Tahun 2013, adapun sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 3.318,51 miliar rupiah. Nilai PDRB untuk sektor ini mengalami peningkatan sebesar 2.384,25 miliar rupiah atau 255,20 persen dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 934,26 miliar rupiah. Peningkatan ini didukung dengan adanya investasi penanaman modal asing untuk sektor perdagangan dan reparasi di tahun 2013 yaitu sebesar 2.595.000 US\$ dolar. Jumlah investasi tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.438.800 US\$ dolar atau 1.571,39 persen.

## **2) Analisis Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Jambi Periode 2001-2021**

Perkembangan tingkat inflasi di Kota Jambi selama periode 2001-2021 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan tingkat inflasi sebesar -0,50 pertahun. Itu artinya penurunan tingkat inflasi lebih dominan dibandingkenaikan tingkat inflasi selama periode 2001-2021. Adapun rata-rata tingkat inflasi di Kota Jambi selama periode 2001-2021 adalah sebesar 6,17 persen per-tahun. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 13,94%, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 1,02. Terkait dengan fluktuasi tingkat inflasi yang terjadi, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *BI rate* atau tingkat suku bunga. Dalam jangka panjang, suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. Hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga akan menyebabkan permintaan investasi menurun. Sehingga ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, akibatnya kapasitas produksi akan menurun. Biayanya produksi akan meningkat karena meningkatnya biaya modal dan harga output, yang berdampak pada kenaikan inflasi (Panjaitan dan Wardoyo, 2016). Hasil penelitian Sinambela (2011), Rahmawati (2011) dan Nugroho (2012) membuktikan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi adalah jumlah uang beredar. Dalam jangka panjang jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi (Atmadja, 1999). Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Wardoyo (2016) yang menemukan bahwa jumlah uang beredar dalam jangka panjang berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia selama tahun 2006-2014.

Tingkat inflasi juga dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika (Atmadja, 1999). Ketidakstabilan nilai tukar ini akan mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang

dalam negeri. Dengan adanya lonjakan-lonjakan drastis pada tingkat kurs tersebut ini akan membuat para Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang dalam negeri. Dengan adanya lonjakan-lonjakan drastis pada tingkat kurs tersebut ini akan membuat para produsen kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, barang modal dan barang modal yang mempunyai kandungan impor yang tinggi sehingga kemudian akan berdampak pada naiknya biaya untuk mengimpor barang untuk keperluan proses produksi sehingga akan mempengaruhi tingkat harga domestik yang merupakan cermin dari tingkat inflasi. Oleh karena itu, nilai tukar (kurs) juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia (Saputra, 2013).

### **3) Analisis Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kota Jambi Periode 2001-2021**

Berdasarkan catatan statistik jasa akomodasi Kota Jambi tahun 2021 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki jumlah hotel terbanyak di Provinsi Jambi, yaitu 89 hotel, yang terdiri dari 29 hotel berbintang dan 60 hotel non bintang. Sementara untuk jumlah restoran di Kota Jambi hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 124 restoran, dimana 29 diantaranya terdapat di hotel berbintang. Terkait perkembangan jumlah wajib pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi selama periode 2001-2021 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan untuk pajak hotel dan pajak restoran, masing-masing sebesar 1,80 persen dan 0,70 persen per-tahun. Adapun jumlah wajib pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 100 orang. Sedangkan jumlah wajib pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2003, yaitu sebanyak 27 orang. Untuk jumlah wajib pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 256 orang. Sedangkan jumlah wajib pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebanyak 110 orang.

### **4) Analisis Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Jambi Periode 2001-2021**

Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang menginap di hotel di Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2001-2021. Adapun jumlah wisatawan (tamu hotel) tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebanyak 367.750 orang. Sedangkan jumlah wisatawan (tamu hotel) terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebanyak 53.171 orang. Dilihat dari perkembangannya jumlah wisatawan (tamu hotel) sepanjang tahun 2001-2021, diketahui bahwa rata-rata perkembangan jumlah wisatawan (tamu hotel) adalah 10,07 persen per-tahun. Nilai rata-rata perkembangan yang positif menerangkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan (tamu hotel) lebih dominan dibandingkan penurunan jumlah wisatawan (tamu hotel) selama periode 2001-2021.

Tinggi rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Jambi mencerminkan permintaan pariwisata di Kota Jambi. Yoeti (2008) mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata, dimana faktor pertama adalah faktor-faktor permintaan umum (*demographic structure and trends*), yang mencakup; (1) daya beli (*purchasing power*) masyarakat, (2) struktur demografi dan kecenderungan (*demographic structure and trends*), (3) sosial dan faktor-faktor budaya (*social and cultural factors*), (4) motivasi berwisata dan sikap (*travel motivations and attitudes*), dan

(5) kesempatan untuk berwisata dan intensitas pemasaran (*opportunities to travel and tourism marketing intensity*). Untuk faktor kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan permintaan khusus (*factors determining specific demand*), yang mencakup; (1) harga, (2) daya tarik wisata, (3) kemudahan berkunjung/aksesibilitas, (4) informasi dan layanan sebelum kunjungan, dan (5) citra.

### **5) Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Jambi Periode 2001-2021**

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya

semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah (Anggoro, 2017). Perkembangan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2001-2021, dengan rata-rata perkembangan jumlah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, masing-masing sebesar 23,18 persen dan 24,03 persen per-tahun. Untuk penerimaan pajak hotel, jumlah penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 17.621.003.070. Sedangkan jumlah penerimaan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar Rp 786.329.031. Terkait penerimaan pajak restoran, jumlah penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 54.912.667.777. Sedangkan jumlah penerimaan pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar Rp 1.146.889.403.

### **Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran**

#### **1) Uji koefisien regresi**

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien dari  $\beta_0$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , dan  $\beta_4$  dengan menggunakan analisis regresi berganda pada program SPSS 21, maka didapatkan model persamaan regresi berganda, yaitu  $Y = 12,102 + 0,578X_1 - 0,440X_2 + 0,398X_3 + 0,910X_4$ . Dari model persamaan regresi tersebut, berarti penerimaan pajak hotel dan restoran akan mengalami kenaikan, bila PDRB, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan ditingkatkan. Namun, penerimaan pajak hotel dan restoran akan mengalami penurunan, jika tingkat inflasi mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan koefisien regresi masing-masing variabel, maka didapatkan gambaran hubungan antar variabel menurut model persamaan regresi sebagai berikut:

- 1) Konstanta ( $a$ ) = 12,102, artinya jika variabel PDRB ( $X_1$ ), tingkat inflasi ( $X_2$ ), jumlah wajib pajak ( $X_3$ ), dan jumlah wisatawan ( $X_4$ ) tidak ada, maka nilai penerimaan pajak hotel dan restoran ( $Y$ ) sebesar 12,102.
- (Y) Koefisien regresi  $X_1$  ( $\beta_1X_1$ ) = 0,578, artinya jika terjadi peningkatan PDRB ( $X_1$ ) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 0,578 persen.
- (Z) Koefisien regresi  $X_2$  ( $\beta_2X_2$ ) = -0,440, artinya jika terjadi peningkatan tingkat inflasi ( $X_2$ ) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 0,440 persen.
- 2) Koefisien regresi  $X_3$  ( $\beta_3X_3$ ) = 0,398, artinya jika terjadi peningkatan jumlah wajib pajak ( $X_3$ ) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran ( $Y$ ) sebesar 0,398 persen.
- 3) Koefisien regresi  $X_4$  ( $\beta_4X_4$ ) = 0,910, artinya jika terjadi peningkatan jumlah wisatawan ( $X_4$ ) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran ( $Y$ ) sebesar 0,910 persen.

#### **2) Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) melalui program SPSS 21 didapatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,933. Hal ini berarti variasi naik turunnya variabel penerimaan pajak hotel dan restoran mampu dijelaskan oleh variabel PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan sebesar 93,3 persen, sementara sisanya sebesar 6,7 persen diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **3) Uji asumsi klasik**

Untuk mengetahui apakah model persamaan regresi berganda, yaitu  $Y = 12,102 + 0,578X_1 - 0,440X_2 + 0,398X_3 + 0,910X_4$  dapat dinyatakan sebagai model yang baik, maka model tersebut harus memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Kriteria tersebut dapat dicapai bila model telah memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi; uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### **Uji normalitas**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada pengujian normalitas data, peneliti menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21. Adapun pedoman dalam menentukan apakah data berdistribusi secara normal pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan melihat apakah nilai sig (signifikansi atau nilai probabilitas) lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,922, dimana  $0,922 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

#### **Uji autokorelasi**

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada model regresi linier yang didapatkan. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel penjelas. Berdasarkan uji Run Test yang telah didapatkan dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21, didapat nilai probabilitas (sig) sebesar 1,000, dimana nilai ini  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala autokorelasi.

#### **Uji multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pedoman dalam mendapatkan keputusan ada tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan menghitung nilai VIF dari setiap variabel independen. Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka model regresi linier tersebut memiliki gejala multikolinieritas, sedangkan bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka model regresi linier tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas. Berdasarkan hasil perhitungan nilai VIF dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21, didapatkan nilai VIF untuk setiap variabel yang diujikan, didapatkan bahwa variabel PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang didapatkan tidak memiliki gejala multikolinieritas, artinya model regresi linier telah memenuhi persyaratan.

#### **Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap, maka model dinyatakan mengalami gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan uji scatterplot dengan alat bantu SPSS, untuk mengetahui apakah model mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa pada scatterplot titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

#### 4) Hasil Pengujian Hipotesis

##### Uji F statistik

Uji F dipergunakan untuk melihat apakah secara simultan variabel PDRB (X1), tingkat inflasi (X2), jumlah wajib pajak (X3), dan jumlah wisatawan (X4) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Y). Berikut adalah tabel hasil analisis uji F:

**Tabel 1.**  
**Hasil pengujian F statistik**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,088	4	6,522	70,946	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,471	16	0,092		
	Total	27,559	20			

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji F statistik dengan bantuan program analisis statistik SPSS 21, didapattkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) dari uji F (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis, yang berarti secara bersama-sama (simultan) PDRB (X1), tingkat inflasi (X2), jumlah wajib pajak (X3), dan jumlah wisatawan (X4) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Y).

##### Uji t statistik

Hasil uji t statistik melalui program SPSS 21 (Tabel 4.) didapatkan nilai signifikansi (sig) untuk variabel PDRB (X1) sebesar 0,002. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel PDRB (0,002) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel dan restoran (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Aji dkk (2018), Putra (2016), dan Afrizal dkk (2019) yang membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Dengan demikian semakin tinggi PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin tinggi juga pendapatan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat, khususnya di sektor industri makanan dan perhotelan. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat di sektor industri makanan dan perhotelan, tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

**Tabel 2.**  
**Hasil pengujian t statistik**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,102	2,672		4,529	0,000
	X1	0,578	0,158	0,463	3,657	<b>0,002</b>
	X2	-0,440	0,199	-0,220	-2,207	<b>0,042</b>
	X3	0,398	0,612	0,098	0,650	<b>0,525</b>
	X4	0,910	0,334	0,456	2,721	<b>0,015</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel tingkat inflasi (X2) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,042. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel tingkat inflasi (0,042) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel

dan restoran (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Dewi dkk (2018) serta Agustina dkk (2016) yang membuktikan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian semakin tinggi tingkat inflasi di Kota Jambi, maka semakin rendah penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat karena adanya kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi ini tentunya dapat mengakibatkan minimnya minat seseorang untuk menginap di hotel dan mengunjungi restoran. Penurunan daya beli dan minat masyarakat ini tentunya akan berdampak pada menurunnya pendapatan hotel dan restoran, yang berujung pada menurunnya kemampuan wajib pajak (pemilik hotel dan restoran) untuk membayar pajak hotel dan pajak restoran. Nilai signifikansi (sig) untuk variabel jumlah wajib pajak (X3) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,525. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel jumlah wajib pajak (0,525) lebih besar dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menolak hipotesis ketiga bahwa variabel jumlah wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel dan restoran (Y). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Putra (2016), Solot (2018), dan Purnamawati (2022) yang membuktikan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Dengan demikian masih menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel jumlah wisatawan (X4) adalah sebesar 0,015. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel jumlah wisatawan (0,015) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis bahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel dan restoran (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Putra (2016), Aliandi dan Handayani (2013), dan Purnamawati (2022) yang membuktikan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Dengan demikian semakin tinggi jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke Kota Jambi, maka tentunya akan semakin meningkat kebutuhan jasa akomodasi perhotelan serta kebutuhan akan konsumsi makanan (kuliner). Kondisi ini tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

### **Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan analisis faktor strategis internal peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi melalui pendekatan matriks *Internal Factor Environment* (IFE), didapatkan faktor kekuatan utama yang dimiliki BPPRD Kota Jambi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, adalah adanya penerapan *self assesment system* dalam pemungutan pajak hotel dan restoran. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor kekuatan ini, dengan perolehan skor sebesar 0,502 (Tabel 5.). Di sisi lain, kelemahan utama yang dimiliki BPPRD Kota Jambi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, yaitu terletak pada faktor minimnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi tentang pajak hotel dan restoran. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor kelemahan ini, dengan perolehan skor sebesar 0,371 (Tabel 5.).

Tabel 3.  
Matriks IFE SWOT Strategi Peningkatan Penerimaan  
Pajak Hotel dan Restorandi BPPRD Kota Jambi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>I. Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>			
1. Ketersediaan teknologi sistem informasi yang memadai	0,124	3,550	0,441

2. Ketersediaan dana operasional dalam pemungutan pajak	0,116	3,425	0,397
3. Pembagian tugas pegawai yang jelas dan terstruktur	0,130	3,625	0,470
4. Sarana dan Prasarana yang lengkap	0,123	3,575	0,441
5. Adanya penerapan <i>self assesment system</i> dalam pemungutan pajak hotel dan restoran	0,135	3,725	0,502
6. Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Jambi	0,119	3,425	0,407
7. Dukungan dan peranan dari berbagai dinas dan lembaga di Kota Jambi	0,127	3,375	0,429
8. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pemungutan pajak hotel dan restoran	0,126	3,450	0,434
<b>Total</b>	<b>1,000</b>		<b>3,522</b>
<b>II. Kelemahan (<i>Weakneses</i>)</b>			
1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di BPPRD Kota Jambi	0,188	1,500	0,281
2. Masih terlihat kurangnya tenaga professional di bidang perpajakan di BPPRD Kota Jambi	0,196	1,550	0,304
3. Sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman terhadap Tupoksi yang masih rendah	0,192	1,450	0,279
4. Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap	0,206	1,625	0,334
5. Minimnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi tentang pajak hotel dan restoran	0,218	1,700	0,371
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>1,569</b>

Hasil analisis faktor strategis eksternal peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi melalui pendekatan matriks *External Factor Environment* (EFE), didapatkan faktor peluang utama yang paling berpengaruh bagi upaya BPPRD Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu jumlah kunjungan wisata yang meningkat baik lokal maupun mancanegara di Kota Jambi. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor peluang ini, dengan perolehan skor sebesar 0,763 (Tabel 6.). Di sisi lain, ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dalam penerapan *self assesment system*, merupakan faktor ancaman utama bagi upaya BPPRD Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor ancaman ini, dengan perolehan skor sebesar 0,308 (Tabel 6.).

Merujuk pada total skor yang didapatkan dari matriks IFE dan EFE, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan kedua kondisi internal dan eksternal tersebut ke dalam Matriks Internal Eksternal agar dapat mengetahui langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan BPPRD Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Pada tahap ini didapatkan bahwa nilai x (0,977) dan nilai y (0,995) bernilai positif, dimana menurut Rangkuti (2016) jika nilai x dan y keduanya bernilai positif, maka organisasi atau perusahaan berada pada kuadran I, sehingga mendukung untuk menerapkan strategi Kekuatan-Peluang (SO), dimana kondisi ini sangat menguntungkan bagi BPPRD Kota Jambi yaitu dengan memaksimalkan peluang dan kekuatan yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

Tabel 4.  
Matriks EFE SWOT Strategi Peningkatan Penerimaan  
Pajak Hotel dan Restorandi BPPRD Kota Jambi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>III. Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>			
1. Dukungan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang memperbesar cakupan bidang kepariwisataaan	0,198	3,500	0,692
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya dari sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran)	0,173	3,425	0,594
3. Potensi dari ketersediaan akomodasi hotel dan restoran di Kota Jambi yang selalu meningkat setiap tahunnya	0,214	3,475	0,745
4. Kemajuan dan pemanfaatan IPTEK	0,210	3,600	0,755
5. Jumlah kunjungan wisata yang meningkat baik lokal maupun mancanegara di Kota Jambi	0,205	3,725	0,763
<b>Total</b>	<b>1,000</b>		<b>3,549</b>
<b>IV. Ancaman (<i>Threats</i>)</b>			
1. Rendahnya kesadaran wajib pajak	0,174	1,650	0,288
2. Ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dalam penerapan <i>self assesment system</i>	0,176	1,750	0,308
3. Rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pengurusan pajak hotel dan restoran	0,165	1,575	0,259
4. Kepariwisataaan daerah lain di luar Kota Jambi yang mempunyai karakteristik, kelengkapan, dan keunikan yang berbeda-beda	0,171	1,500	0,257
5. Krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi, sangat berpengaruh terhadap pungutan pajak hotel dan pajak restoran	0,168	1,450	0,244
6. Isu terorisme global, gangguan keamanan dan kesehatan (wabah) dan gangguan sosial lainnya	0,145	1,400	0,203
<b>Total</b>	<b>1,000</b>		<b>1,559</b>

Upaya-upaya yang dapat dilakukan berdasarkan strategi menurut kuadran I (SO), mencakup; (1) mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hotel dan restoran, (2) melakukan pendataan wajib pajak hotel dan restoran secara efektif, (3) bekerjasama dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka memajukan kepariwisataaan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kota jambi, (4) mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan tentang pajak hotel dan restoran kepada seluruh wajib pajak, (5) memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan sumber daya manusia yang memadai dan potensi wisata daerah, (6) pemanfaatan jaringan sistem informasi pelayanan pajak secara maksimal, dan (7) meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, jumlah wisatawan, serta penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama kurun waktu 2001-2021 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Rata-rata perkembangan PDRB Kota Jambi adalah sebesar 17,77 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan tingkat inflasi di Kota Jambi adalah sebesar 6,17 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan jumlah hotel yang terdata sebagai wajib pajak di Kota Jambi adalah sebesar 1,80 persen per-tahun, dan rata-rata perkembangan jumlah restoran yang terdata sebagai wajib pajak di Kota Jambi adalah sebesar 0,70 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke Kota

- Jambi adalah sebesar 10,07 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan jumlah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Jambi masing-masing sebesar 23,18 persen per-tahun dan 24,03 persen per-tahun.
2. Merujuk pada hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi selama periode 2017-2021, sedangkan jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi selama periode 2017-2021. Sementara secara simultan PDRB, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi selama periode 2017-2021.
  3. Merujuk pada hasil analisis faktor strategis internal dan hasil analisis faktor strategis eksternal didapatkan bahwa model strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh BPPRD Kota Jambi yaitu strategi Kekuatan-Peluang (SO), dimana strategi ini sangat menguntungkan bagi BPPRD Kota Jambi yaitu dengan memaksimalkan peluang dan kekuatan yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran

### **Saran**

Perlunya penambahan pegawai atau petugas terutama bidang pelayanan serta bidang pendataan, penyuluhan penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya, dikarenakan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih kurangnya jumlah petugas terutama untuk melakukan sosialisasi dan pendataan, mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh petugas.

Terkait dengan ancaman utama yang dihadapi BPPRD Kota Jambi yaitu ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dalam penerapan *self assesment system*, maka dapat diatasi dengan menerapkan sanksi secara lebih tegas kepada para wajib pajak yang melanggar aturan.

Mengingat peluang pertumbuhan jumlah wisatawan yang juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, maka pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan promosi media cetak dan elektronik di industri pariwisata, dan menata objek destinasi wisata di Kota Jambi agar tidak hanya terkonsentrasi di satu kawasan. Selain itu, memanfaatkan insentif finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan bisnis hotel dan restoran serta membantu mereka meningkatkan layanan yang mereka berikan agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran yang ada di Kota Jambi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, M.F.N., Fajar, C.M., dan Komalasari, Y. (2019). Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Sain Manajemen*, Vol. 1 (1): 51-63
- Agustina, S., Susetyo, D., dan Yunisvita. (2016). Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 14 (1): 22-30
- Ali, S.H., Engka, D.S.M., dan Rompas, W.F.I. (2018). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 (5): 143-151
- Aliandi, V.D.A. dan Handayani, H.R. (2013). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta). *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2 (4): 1-14

- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. (2020). Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Jambi (Audited) Tahun 2020. David, F.R. (1998). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo
- David dan Rangkuti, F. (2006). *Manajemen Strategis: Konsep-Konsep*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat
- Dewi, N.P., Mahadianto, M.Y., dan Mardi. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 2 (2): 210-224
- Dimas, A.D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta: UB Press
- Elfindri, Ekwarso, H., dan Zamzami. (2019). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Elfindri dkk. (2023). *Pembangunan dan Ketimpangan (Isu Publik, Agenda Riset, dan Kebijakan)*. Padang: Unand Press
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Grant, R.M. (1999). *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga
- Hunger, D. & Wheelen, T.L. (2012). *Strategic Management and Bussiness Policy: Toward Global Sustainability*. 13th Edition. New York: Pearson Prentice Hall
- Ilyas, W.B. dan Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Buku Satu)*. Jakarta: Salemba Empat
- Jatmiko, R.D. (2003). *Manajemen Stratejik*. Malang: UM Press
- Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). *Exploring Corporate Strategy*. 7nded. London: Prentice Hall
- Latumaerissa, J. R. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- \_\_\_\_\_. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marrus, S.K. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press
- Miles, M.B, Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mintzberg, H. (2007). *Tracking Strategies: Toward a General Theory*. New York: Oxford University Press
- Mokoginta, N.C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 (1)
- Nawawi, H. (2005). *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Purnamawati, A. (2022). Pajak Hotel Sebagai Pemediiasi Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9 (1): 28-39
- Putong, I. (2013). *Ekonomics, Pengantar Mikro dan Makro*. Bogor: Mitra Wacana Media

- Putra, A.A. (2016). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *JOM FEKON*, Vol. 3 (1): 2023-2033
- Rangkuti, F. (2003). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. (2015). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. (2017). *SWOT Balanced Scorecard; Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7 (2): 223-242
- Siagian, S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Solot, F.T. (2018). Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1 (2): 70-81
- Suardi, Juhardi, dan Muliati. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan dan Potensi Pajak Hotel. *JIEM: Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol. 1 (1): 53-61
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno (2020). Kredit Bermasalah sebagai Pemoderasi Pengaruh Tingkat Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, Vol.5 (1)
- Syamsi, I. (1994). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Tjiptono, F. (2000). *Strategi Pemasaran*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Andi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wahyudi, A.S. (1996). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widyaningsih, P. dan Budhi, M.K.S. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 3 (4): 155-163
- Yuliadi, I. (2008). *Ekonomi Moneter*. Jakarta : PT. Indeks
- Yulianti, D. (2018). *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandarlampung: Pusaka Media